

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Ketimpangan

Teori yang menjelaskan fenomena ketimpangan yakni Teori Kuznet dengan hipotesis U terbaliknya. Teori ini menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan antar wilayah meningkat pada awal fase pembangunan ekonomi dan kemudian menurun seiring proses pembangunan ekonomi Menurut Williamson (Sjafrizal & Elfindri, 2008). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar wilayah di Indonesia masih mengalami tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi. Realita yang terjadi adalah ketimpangan distribusi pendapatan semakin meningkat seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Masalah ketimpangan menjadi sangat penting untuk segera diatasi agar kesejahteraan ekonomi dapat dirasakan oleh rakyat bersama, bukan hanya sebagian rakyat.

Mubyarto (1998) membedakan ketimpangan menjadi 3 kategori :

- 1) Kesenjangan antar sektor, yaitu sektor pertanian dan industri;
- 2) Kesenjangan antar daerah; dan
- 3) Ketimpangan antar golongan. Kesenjangan jenis ini adalah yang paling berat dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal, di mana perekonomian tumbuh terlalu cepat dan mengakibatkan kesenjangan semakin parah. Kategori terakhir, senada dengan Baldwin (1986), bahwa ketimpangan

pendapatan diartikan sebagai perbedaan tingkat kemakmuran ekonomi antara orang kaya dan orang miskin yang dicerminkan oleh perbedaan pendapatan.

Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. (Kuncoro, 2006)

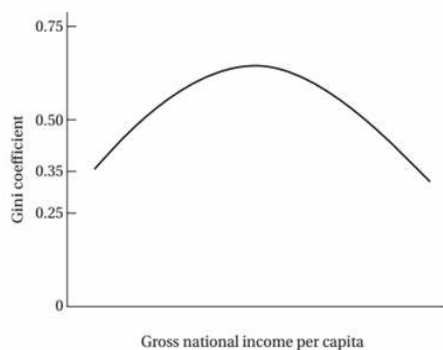
Berdasarkan penelitian Baldwin (1986) menerangkan bahwa ketimpangan berarti adanya gap pemisah yang cukup besar antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. Menurut Baldwin (1986), kesenjangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. ketimpangan pendapatan berkaitan dengan distribusi pendapatan yang diperoleh masyarakat di suatu negara. ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi berarti bahwa distribusi pendapatan dalam masyarakat menjadi semakin tidak merata. kondisi tersebut pada akhirnya akan memperlebar jurang antara mereka yang memiliki status ekonomi relatif baik (kelompok kaya) dan kelompok berpenghasilan rendah (kelompok miskin) (Amri & Aimon, 2017).

Pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Terdapat dua konsep pokok mengenai pengukuran distribusi pendapatan, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang

menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak (Sukirno, 2006). Sedangkan konsep ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Sukirno, 2006).

Pemerataan pendapatan dapat ditinjau dari tiga segi. Pertama pembagian pendapatan antar lapisan masyarakat. Kedua, pembagian pendapatan antar daerah, yaitu daerah perkotaan dan pedesaan. Ketiga pembagian pendapatan antar wilayah, dalam hal ini antar kab/kota (Dumairy, 1997).

Kuznets (1955), mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan mengalami peningkatan. Observasi inilah yang kemudian, dikenal sebagai kurva Kuznet “U-terbalik”, karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan. Kurva kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern.



Gambar 2.1
Kurva Kuznet

Sumber : Todaro & Smith (2003)

Menurut Kuznet pertumbuhan awal seperti dijelaskan dalam model Lewis, di mana pertumbuhan yang terjadi di awal pembangunan akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Namun pada suatu titik tertentu pertumbuhan yang terjadi akan mengurangi tingkat gini rasio.

Menurut Todaro & Smith (2003), pemerataan yang lebih adil di negara berkembang adalah suatu kondisi atau keadaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, semakin timpang distribusi pendapatan akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan antar daerah didasarkan pada jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penerima pendapatan, baik itu golongan masyarakat maupun wilayah tertentu. (Todaro & Smith, 2006) (Todaro Keadaan tersebut dijelaskan Todaro (1981), bahwa negara-negara maju memiliki pembagian pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan negara-negara dunia ketiga, atau sedang berkembang.

Ketimpangan distribusi pendapatan dalam penelitian ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan relatif ditinjau dari pembagian pendapatan antar lapisan masyarakat di Kab/kota di DIY. Indikator ketimpangan yang dipakai adalah indeks Gini yang diturunkan dari kurva Kuznet.

1. *Gini Rasio*

Koefisien gini atau Gini Ratio sebagai indikator untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan. Rumus koefisien Gini sebagai berikut :

$$GR = 1 - \sum_1^n (X_i + 1)(Y_i + Y_{i+1})$$

$$0 < G < 1$$

$$GR = 1 - \sum_1^n f_i (Y_i + Y_{i+1})$$

GR = Gini Rasio

F_i = proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas

X_{i+1} = proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas ;

Y_{i+1} = proporsi kumulatif pendapatan dalam kelas ;

Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Ketika rasio gini menurun maka artinya distribusi pengeluaran penduduk membaik dan sebaliknya.

Berdasarkan kelasnya, indeks gini terbagi menjadi beberapa kelas di antaranya sebagai berikut :

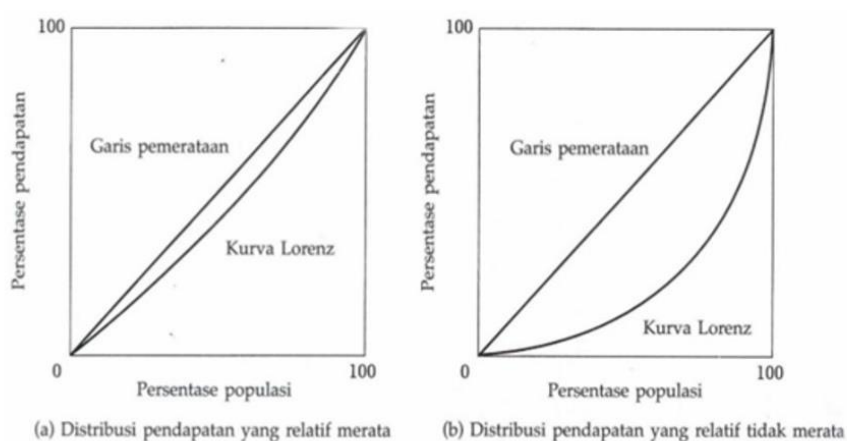
Tabel 2.1
Kelas Indeks Gini

Nilai	Keterangan
<0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4-0,5	Tingkat ketimpangan sedang
>0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

Menurut Bank Dunia, ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk. Terdapat tiga klasifikasi ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia, yaitu:

1. Ketimpangan Tinggi. 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima < 12% dari total pendapatan.
2. Ketimpangan Sedang. 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima 12%-17% dari total pendapatan.
3. Ketimpangan Rendah. 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima > 17% dari total pendapatan.

Perhitungan rasio gini berasal dari pengukuran luas dari sebuah kurva yang mempresentasikan distribusi pendapatan kelompok masyarakat. Kurva itu dinamakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva yang dibuat berdasarkan angka-angka yang digunakan dalam perhitungan size distribution dengan cara menampilkannya dalam bentuk kurva. Dengan menggunakan garis horisontal persentase penduduk dan garis vertikal sebagai persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 26 penduduk, maka data dalam size distribution bisa digambarkan dalam bentuk kurva Lorenz (Gastwirth, 1971)



Gambar 2.2
Kurva Lorenz

Sumber : (Todaro & Smith, 2006)

Secara visual, Indeks Gini dapat dijelaskan menggunakan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz memiliki sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal menyatakan jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase kumulatif (penduduk). Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut. Semakin besar tingkat ketimpangan, kurva Lorenz akan semakin melengkung dan semakin mendekati bagian bawah sumbu horizontal.

Cara untuk menggambar kurva Lorenz dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengurutkan data pengeluaran dari nilai terkecil hingga terbesar.
- 2) Menentukan desil pertama hingga ke sepuluh pada distribusi data.
- 3) Menghitung besarnya pendapatan pada masing-masing kelompok desil.
- 4) Menentukan kumulatif pendapatan pada masing-masing kelompok desil.
- 5) Menghitung persentase kumulatif pendapatan masing-masing desil.
- 6) Memetakan dalam plot 2 dimensi antara tiap-tiap desil sebagai sisi horizontal dan nilai persentase kumulatif pendapatan pada sisi vertikal.

Kurva Lorenz menjelaskan tingkat ketimpangan dengan menampakkan area timpang yang dibentuk oleh garis lurus dan lengkung pada kurva. Sehingga fluktuasi angka ketimpangan dari waktu ke waktu ataupun perbandingan antar tempat sulit untuk dibedakan. Ukuran secara kuantitatif akan diperjelas dengan perhitungan indeks Gini.

Berdasarkan studi empiris, ada dua jenis ketimpangan pendapatan yang menjadi fokus, yakni ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat dan ketimpangan pendapatan regional. Menurut Taylor & Fry (2012), ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat membahas kesenjangan antara golongan yang berpendapatan tinggi dan golongan yang berpendapatan rendah (Kuncoro, 2015). Soekanto & Siswosoemarto (2012) mengungkapkan bahwa akibat adanya masalah ini adalah munculnya kecemburuan sosial, ketegangan, dan terus memicu kesenjangan.

2.1.1.1 Penyebab Ketimpangan Pendapatan

Arsyad (2010) berpendapat bahwa ada 8 faktor penyebab terjadinya kesenjangan pendapatan di suatu wilayah, antara lain:

1. Penurunan pendapatan per kapita karena tingginya tingkat pertumbuhan penduduk.
2. Terjadinya inflasi, yakni pendapatan meningkat tapi tak dibarengi peningkatan jumlah produksi barang.
3. Adanya pembangunan yang tidak merata antar wilayah.
4. Terjadinya mobilitas sosial yang rendah.
5. Kurs negara berkembang yang memburuk dalam perdagangan dengan negara maju akibat tidak elastisnya permintaan barang ekspor negara maju terhadap negara berkembang.
6. Usaha kerajinan rakyat layaknya industri rumah tangga dan lainnya mengalami kehancuran.

7. Kebijakan industri substitusi impor yang dilaksanakan menyebabkan peningkatan harga guna menjaga usaha kapitalis.
8. Banyaknya penanaman modal dalam proyek yang bermodal intensif, sehingga profit pendapatan modal kerja tambahan yang lebih besar dibanding profit pendapatan kerja, sehingga jumlah pengangguran meningkat.

Menurut Sjafrizal (2012), ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah, yaitu :

- a. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam akan lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

- b. Perbedaan Kondisi Demografis

Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan

pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografisnya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah.

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang Dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi atau daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

d. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah di mana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan

penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya bilamana konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

e. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintah daerah yang dianut. Bila sistem pemerintah daerah yang dianut bersifat *sentralistik*, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi, sebaliknya bilamana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak di alokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah.

2.1.1.2 Dampak Ketimpangan Pendapatan

Menurut Todaro & Smith (2004), terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dapat memberikan dampak yaitu berupa dampak positif dan dampak negatif. Positifnya, dapat mendorong daerah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan akan tercapai. Negatifnya, dapat menimbulkan beberapa masalah di antaranya inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial dan solidaritas serta ketimpangan yang tinggi akan dirasa tidak adil.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat juga menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan ketimpangan antar wilayah (yang maju dan tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan maupun antar wilayah dapat menimbulkan permasalahan seperti kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang semakin tajam dan melebar.

2.1.2 Tingkat Pendidikan

Bentuk keadilan dan pemerataan hasil pembangunan dapat dibuktikan oleh pemerintah dengan memberikan hak sepenuhnya bagi warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu serta dapat dirasakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Hal tersebut yang menjadi investasi sumber daya manusia karena diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi secara merata dan berkelanjutan. Akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan serta wawasan yang luas dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang sistem pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang direncanakan oleh diri sendiri dalam rangka mewujudkan suasana dan proses pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik secara aktif mengetahui potensi diri yang dimiliki seperti kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Sehingga di kemudian hari potensi yang dimiliki dikembangkan serta bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.

Menurut *The Human Capital* (Ghazali, 2000) telah dinyatakan bahwa pendidikan, pelatihan, atau berbagai macam bentuk investasi sumber daya manusia lainnya dalam hal menanamkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan yang berguna pada manusia sehingga manusia tersebut dapat meningkatkan kapasitas maupun produktivitasnya. Di mana hal ini nanti akan memungkinkannya untuk mengejar tingkat pendidikan atau pelatihan yang lebih tinggi lagi serta untuk meningkatkan pendapatan masa mendatang mereka dengan meningkatkan penghasilan seumur hidup.

Beberapa permasalahan yang menghambat pemerataan pendidikan pada pelajar adalah kesempatan yang berbeda di setiap daerah khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan, produktivitas tenaga pengajar yang terbilang rendah, tidak tersedianya fasilitas yang cukup memadai di setiap sekolah-sekolah terutama di daerah pedesaan serta kurangnya motivasi bagi para orang tua pelajar untuk dapat menyekolahkan anaknya setinggi mungkin hingga menjadi penduduk yang siap bersaing dalam memasuki pasar tenaga kerja.

2.1.2.1 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang menggambarkan pengetahuan atau tingkat pendidikan seseorang dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Cakupan dalam menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas (diasumsikan telah menyelesaikan pendidikannya). Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel rata-rata lama sekolah yang merupakan proses pembangunan manusia yang mengukur keberhasilan program pendidikan dalam jangka pendek. Rata-rata lama sekolah merupakan variabel yang

dinilai dapat memberi gambaran tentang pencapaian dan penambahan jumlah sumber daya manusia yang berkualitas di suatu wilayah. Variabel rata-rata lama sekolah dipertimbangkan karena merupakan hal yang telah terjadi dan fakta di masyarakat.

2.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk dibedakan menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Berdasarkan UU No.13 tahun 2003 Bab 1 disebutkan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Yang tergolong dalam definisi tenaga kerja yaitu penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Pada dasarnya, usia kerja membedakan tenaga kerja dari bukan tenaga kerja. Menurut Bank Dunia, rentang usia kerja berkisar antara 15 dan 64 tahun. Namun, dari tahun 1971 - 1999 batas usia kerja di Indonesia adalah 10 tahun ke atas. Batas usia 10 tahun tersebut didasarkan pada fakta bahwa banyak orang sudah bekerja di daerah pedesaan. Namun, sejak tahun 2001, Indonesia mengikuti anjuran *Internasional Labour Organisation* (ILO), mengubah usia kerja tertinggi dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Dengan mengingat fakta bahwa peningkatan tingkat produksi berkorelasi dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja yang bekerja, angkatan kerja adalah salah satu faktor yang positif dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan.

Angkatan Kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada periode tertentu. Angkatan Kerja sendiri terdiri dari 2 golongan yaitu golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Dalam masyarakat ada yang tidak dihitung atau termasuk dalam kategori angkatan kerja seperti penduduk yang masih menempuh sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan masyarakat penerima pendapatan. (Sukirno, 2007)

Menurut Simanjuntak & Payaman (1985) perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dalam kelompok yang sama ini disebut tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dalam menentukan angka TPAK menurut simanjuntak dalam rumus seperti ini :

$$TPAK = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{penduduk usia kerja}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut menunjukkan bahwa, TPAK merupakan rasio atau perbandingan antara angkatan kerja yang bekerja dengan penduduk usia kerja (15-64 tahun). Dalam hal ini TPAK merupakan bagian dari tenaga kerja dan penduduk. Selain itu, TPAK merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berlangsungnya peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun pada peningkatan pendapatan. Ketika nilai TPAK tinggi atau meningkat, maka akan mengurangi atau menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, karena semakin tinggi TPAK menggambarkan semakin banyak orang yang bekerja. Faktor ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan.

Menurut Hayes (2023) Rumus Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah sebagai berikut:

$$TPAK = \frac{(Jumlah\ Pekerja + jumlah\ mencari\ pekerjaan) \times 100\%}{Populasi\ Sipil\ Non\ Institusi}$$

Hal ini berlaku untuk semua populasi yang berusia 16 tahun ke atas.

Terdapat temuan bahwa terdapat hubungan positif antara TPAK dan ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa selama rentang waktu 2010-2016 (Rahma, 2018). Penelitian di Kawasan Gerbang kertosusila selama tahun 2009-2018 juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara beban kerja dan ketimpangan distribusi pendapatan (Wulandari, 2020). Namun, penelitian lain menemukan hubungan negatif dan signifikan antara angkatan kerja dan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2010-2020 (Rosalitta & Muljaningsih, 2022). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa angkatan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia selama kurun waktu 2010-2019 (Hulu & Wahyuni, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan (2014), diketahui bahwa Produktivitas Tenaga Kerja dan IPM berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi di Pulau Jawa yaitu sebesar 71,15%. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki nilai TPAK paling besar di Pulau Jawa nyatanya memiliki nilai PDRB Per kapita terendah di Pulau Jawa dalam kurun waktu 2008-2018. Dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi belum bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya.

Partisipasi angkatan kerja memiliki arti keikutsertaan dalam atau menjadi angkatan kerja. Jadi, tingkat partisipasi angkatan kerja menunjuk kepada persentase jumlah penduduk umum kerja yang termasuk dalam angkatan kerja. Hal ini berbeda dengan partisipasi kerja yang memiliki arti keikutsertaan dalam atau mempunyai pekerjaan. Dapat disimpulkan tingkat partisipasi kerja menunjuk kepada persentase jumlah angkatan kerja yang mempunyai pekerjaan (*employment rate*) (Suroto, 1992).

2.1.3.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK

Menurut Simanjuntak (2001:45) faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya TPAK yaitu:

1. Penduduk yang masih sekolah dan mengurus rumah tangga. Semakin besar penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja, semakin kecil pula TPAK nya.
2. Jenis Kelamin. TPAK antara laki-laki dan perempuan berbeda, pada umumnya TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan dengan TPAK hal ini disebabkan oleh sistem nilai di masyarakat, bahwa laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah.
3. Tingkat umur. Penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab sebagai pencari nafkah untuk keluarga, karena mereka pada umumnya bersekolah.

4. Tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin banyak anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja, maka semakin banyak jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan tingginya TPAK
5. Tingkat pendidikan. Semakin banyak penduduk yang bersekolah maka jumlah angkatan kerja semakin kecil sehingga TPAK rendah. Selain itu semakin tinggi Pendidikan semakin banyak peluang yang disediakan untuk bekerja dan nilai waktunya semakin mahal.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Ciri utama suatu daerah dapat melaksanakan otonomi daerahnya dengan baik dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah yang dimilikinya (Sidik, 2002). Artinya, daerah otonom harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya secara mandiri dan meminimalisir ketergantungan terhadap bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Sumber keuangan daerah yang berasal dari pengoptimalan potensi daerahnya sendiri tersebut disebut Pendapatan Asli Daerah atau biasa disingkat PAD (Marbun, 2010). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berfungsi untuk menanggung sebagian beban belanja dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku (Darise, 2009). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam pasal 6 Undang -Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah berasal dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang diberlakukan kepada orang pribadi atau badan dengan tujuan menambah kas daerah demi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan yang lancar dengan imbalan tidak langsung dan bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang diberlakukan kepada orang pribadi atau badan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.

3. Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, berasal dari bagian laba dari BUMD dan jasa kerja sama dengan pihak ketiga.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, meliputi (Marbun, 2010):

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Menurut Sidik (2002) terdapat beberapa prinsip agar penerimaan PAD dapat ditingkatkan secara efektif, antara lain:

1. Prinsip elastisitas. Artinya, penetapan kebijakan pajak dan retribusi dapat disesuaikan dengan naik atau turunnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa dibebankan oleh kebijakan pajak atau retribusi yang akan diterapkan.
2. Prinsip adil dan merata secara vertikal dan horizontal. Artinya, penetapan pajak dan retribusi disesuaikan dengan tingkatan kelompok masyarakat serta berlaku bagi seluruh anggota masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. Prinsip administrasi yang fleksibel. Artinya, struktur PAD harus mudah dihitung dan dipahami serta pelayanan pajak harus memuaskan si wajib pajak.
4. Prinsip keberterimaan politis. Artinya, kebijakan pemungutan pajak dan retribusi harus diterima secara politis oleh masyarakat sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi tersebut.
5. Prinsip non-distorsi terhadap perekonomian. Artinya, penetapan kebijakan pajak dan retribusi tidak menimbulkan beban berlebih terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan.

PAD merupakan faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan. Menurut Sidik (2002) kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan pendapatan sangat beragam, tergantung kondisi masing-masing daerah yang bersangkutan apakah memiliki kekayaan sumber daya atau tidak. Atau daerah dengan intensitas

kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah. Akibat dari perbedaan tersebut kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan menjadi berbeda.

Kemampuan daerah dalam menerapkan desentralisasi fiskal dapat dilihat dari kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah yang dapat diukur dengan menganalisis rasio komponen APBD (pendapatan dan pengeluaran daerah) yang telah ditetapkan (Halim, 2011). Menurut UU No. 23 tahun 2004, pendapatan daerah terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain yang sah. Hubungan antara PAD dengan IPM didasarkan pada teori Adolf Wagner yang menyatakan bahwa perekonomian akan meningkat apabila sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang kemudian akan mempengaruhi peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor publik sehingga akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Selain itu, PAD merupakan indikator yang kemandirian dan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah di sektor publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Delavallade (2006) berpendapat bahwa anggaran infrastruktur publik ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sehingga akan dapat mewujudkan pembangunan manusia.

Berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (otonomi daerah) (Wayan, 2014).

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan sesuai dengan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), lain-lain PAD yang sah, serta Dana Transfer dari pemerintah pusat yang dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Secara teoritis, pengukuran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah serta hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber pembiayaan yang utama dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota mestinya berasal dari kemandirian daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun menurut Mudrajad (2004), dalam realisasinya menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Sejalan dengan hal tersebut, membawa implikasi adanya transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal.

Pada umumnya porsi terbesar PAD bersumber dari retribusi dan pajak daerah. Namun, setiap daerah mempunyai kondisi yang berbeda, sehingga porsi dari sumber PAD dapat berbeda antardaerah. Daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pelayanan publik daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan untuk menggali potensi daerahnya sendiri. Pujiati

(2008) mengatakan bahwa dengan adanya kewenangan daerah dalam mengoptimalkan PAD, maka akan memberikan peningkatan komposisi PAD itu sendiri sebagai penerimaan daerah. Peningkatan PAD dapat menimbulkan lebih banyak eksternalitas yang bersifat positif serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Paat et al., 2019).

PAD adalah hasil oleh orang-orang dalam suatu lembaga atau daerah dengan target dan realisasi yang telah ditentukan. PAD diindikasikan berpengaruh terhadap belanja yang dilakukan oleh suatu daerah. Hal ini dikarenakan apabila PAD berbanding lurus dengan belanja pemerintah daerah (Hasibuan & Tiara, 2021). PAD terdiri atas pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.1.5 Upah Minimum Kabupaten/Kota

Menurut pasal 1 ayat 30 undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Maimun, 2007), upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerja kepada pekerja atau buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa :

- a) Upah adalah hak pekerja atau buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan.

- b) Upah yang telah diterima oleh pekerja atau buruh harus dinyatakan dengan uang.
- c) Upah yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
- d) Tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya merupakan komponen dari upah.

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum terbagi atas :

1. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota. Besar upah ini tiap wilayah provinsi atau kabupaten atau kota tidak sama, tergantung nilai kebutuhan hidup minimum (KHM) di daerah yang bersangkutan. Setiap kabupaten atau kota tidak boleh menetapkan upah minimum dibawah upah minimum di provinsi yang bersangkutan.
2. Upah minimum berdasarkan sektor atau sub sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten atau kota.

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1989 pada pasal 1 huruf (a) tentang pengertian upah minimum (Maimun, 2007) disebutkan bahwa upah minimum adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Komposisi upah pokok serendah-rendahnya 75 persen dari upah minimum.

2.1.5.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah

Heidjerachman Ranupanjodo dan Suad Husnan (1990), mengemukakan faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah adalah:

- 1) kerjanya langka, maka upah cenderung tinggi. Sedangkan untuk jabatan - jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah, upah cenderung turun. Sehubungan dengan tenaga kerja permintaan adalah hubungan antara tingkat upah (yang ditilik dari perspektif seorang majikan adalah harga tenaga kerja) (Don Bellante dan Mark Penawaran dan Pemintaan tenaga kerja

Untuk pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan tinggi dan jumlah tenaga Jacson, 1983).

- 2) Organisasi Buruh

Ada tidaknya organisasi buruh serta lemah kuatnya organisasi buruh akan ikut mempengaruhi terbentuknya tingkat upah.

- 3) Kemampuan Untuk Membayar

Meskipun mungkin serikat buruh menuntut upah yang tinggi, tetapi pada akhirnya realisasi pemberian upah tergantung juga kepada kemampuan membayar dari perusahaan.

- 4) Produktivitas

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas jasa atau prestasi kerja. Semakin tinggi prestasi kerja karyawan seharusnya besar pula tingkat upah yang akan diterima. Prestasi ini biasanya dinyatakan dengan produktivitas

- 5) Biaya hidup

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah biaya hidup di kota kota besar, di mana biaya hidup tinggi upah cenderung juga tinggi, bagaimanapun tampak nya biaya hidup merupakan „batas penerimaan upah dari karyawan.

6) Pemerintah

Pemerintah dengan peraturan-peraturannya mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tentang upah minimum merupakan batas bawah dari tingkat upah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu acuan dalam menganalisis suatu penelitian yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Oleh karena itu, pada sub bab ini penulis ingin mengemukakan beberapa penelitian yang pernah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, TPAK, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kab/kota Provinsi D.I.Y Tahun 2011-2023. Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun/Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Novia N.A Wijayanti, Arivina Ratih, Moneyzar Usman, Neli Aida, Ukhti Ciptawaty (2023) "Analisis Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Periode Tahun 2018-2021".	Variabel independen: Angkatan Kerja Variabel dependen: Ketimpangan Pendapatan	Variabel independen: Investasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Modal tetap bruto dan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh negatif signifikan, tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada 34 provinsi di Indonesia.	Economics and Digital Business Review Volume 4 ISSN 2774-2563

No	Penulis/Tahun/Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Harun Nur Jamiel, Nurul Anwar, Agus Arifin, Rini Agustin Eka Yanti, dan Ilah (2022), “Determinan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat”.	Variabel independen: Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah Variabel dependen: Ketimpangan Pendapatan	Variabel independen : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus”	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.	https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/edukasi
3	Zeni Nugri Aryani, Abdul Aziz Ahmad, dan Diah Setyorini Gunawan (2023) “Analisis Pengaruh Pertumbuhan, Aglomerasi, PAD, Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah pada Kab/kota di Yogyakarta Tahun 2011-2022”	Variabel independen: PAD Variabel dependen: Ketimpangan Pendapatan	Variabel independen: Pertumbuhan per Kapita, Aglomerasi, Investasi	Pertumbuhan per kapita berpengaruh positif signifikan, PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah dan investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di antar wilayah pada kab/kota di Yogyakarta tahun 2011-2022.	Lingkar Ekonomika Vol 2 No. 2
4	Muhammad Irfan Saputra, T. Zulham (2023), “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kota Banda Aceh”	Variabel independen: Tingkat Pendidikan, Upah minimum Variabel dependen: Ketimpangan Pendapatan	Variabel independen: Jumlah Penduduk, Inflasi	Tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan, jumlah penduduk memiliki pengaruh positif, Inflasi tidak berpengaruh, upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kota Banda Aceh.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Vol.8 No.3 Agustus 2023 : 178-188 ISSN.2549-8363

No	Penulis/Tahun/Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Kasman Karimi, Pertiwi Mulyani, Neng Murialtri, Tibrani (2023) “Pengaruh Penanaman Modal, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran, dan Upah Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia”.	Variabel independen: Upah Minimum Variabel dependen: Ketimpangan Pendapatan	Variabel independen: Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran	Penanaman Modal Asing terdapat hubungan positif dan signifikan, Persepsi terdapat pengaruh yang signifikan dan berhubungan positif, Kemiskinan terdapat pengaruh yang signifikan dan berhubungan positif, Pengangguran terdapat pengaruh yang signifikan dan berhubungan positif.	Jurnal Akuntansi & Ekonomika, Vol. 13 No. 1
6	Nuridha Firdianisa, Kiky Asmara (2023) “Analisis Pengaruh Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2021”.	Variabel independen: TPAK Variabel dependen: Ketimpangan Pendapatan	Variabel independen: PDRB menurut ADHK Lapangan Usaha, TPT	PDRB menurut lapangan usaha berpengaruh terhadap pendapatan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur 2015-2021.	Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan Vol. 3 No. 3
7	Devita Fatma Wulandari, Farida Rahmawati (2022) “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pembangunan manusia, Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Indonesia”	Variabel independen: TPAK Variabel dependen: Ketimpangan Pendapatan Indonesia	Variabel independen: Pengeluaran Pemerintah, Pembangunan Manusia	pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, dan pembangunan manusia secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. secara parsial mengindikasikan pengeluaran pemerintah	Ekonomi, Keuangan, Investasi, dan Syariah (Ekuitas) Vol. 3 No.3

No	Penulis/Tahun/Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				memberikan pengaruh yang signifikan dan positif jika dihubungkan terhadap ketimpangan pendapatan. Tenaga kerja mengindikasikan bahwa hubungannya adalah positif tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Sedangkan pengaruh yang signifikan lainnya terdapat pada pembangunan manusia dan hubungannya adalah negatif apabila dianalisis terhadap variabel ketimpangan pendapatan.	
8	Berliana Ivanovi Sulistyaningrum, Dr. Ardito Bhinadi, S.E, M.Si, Rini Dwi Astuti, S.E, M.Si (2022) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi - Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020”	Variabel independen: Upah Minimum Provinsi Variabel independen: Ketimpangan Pendapatan	Variabel independen: Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia	Berdasarkan Hasil Penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.	Sinomika Journal Vol.1 No. 4

No	Penulis/Tahun/Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Lorentino Togar Laut, Arinda Sita Putri, Yusrtirani Septiani (2020) “Pengaruh PMA, PMDN, TPAK, PDRB Per Kapita, Pemerintah Terhadap Disparitas Pendapatan Jawa tahun 2008-2018”.	Variabel independen: TPAK Variabel dependen: ketimpangan Pendapatan	Variabel independen: Penanaman Modal Asing (PMA), PMDN, PDRB perkapita	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa tahun 2008-2018. Sedangkan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB perkapita, berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa tahun 2008- 2018. Dari seluruh variabel berpengaruh secara simultan terhadap disparitas di Pulau Jawa tahun 2008-2018.	STABILITY Journal of Management & Business Vol.3 No.2
10	Ni Luh Gde Mitha Ardiyanti, Ini Nyoman Reni Suasih (2023) “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Investasi, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan”.	Variabel independen: Upah Minimum, Tingkat Pendidikan Variabel dependen: Ketimpangan Pendapatan	Variabel independen: Investasi, Biaya pembangunan infrastruktur	Tingkat pendidikan, upah minimum, investasi, dan biaya pembangunan infrastruktur berpengaruh simultan. Secara parsial tingkat Pendidikan dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan investasi dan biaya pembangunan infrastruktur berpengaruh negatif dan tidak signifikan.	E-Jurnal EP Unud, 12 [7] ISSN: 2303-0178

No	Penulis/Tahun/Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Muhammad Anshari, Zul Azhar, Ariusni (2018) “Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Indonesia”.	Variabel Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Variabel Dependen: Ketimpangan Pendapatan	Variabel independen: Belanja Modal	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan negatif, Upah minimum provinsi memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif, dan Belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan dan positif dan secara simultan pendidikan, UMP, dan belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi Indonesia.	EcoGen Vol. 1 No.3
12	Darwin Hartono (2020) “ Ffactors That Influence Income Inequality Distribution in Central Java Province “ Faktor – Faktor yang memengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Jawa Tengah”.	Variabel Upah Minimum Provinsi Variabel dependen: Ketimpangan Pendapatan.	Variabel independen: Penduduk, Inflasi	Secara parsial upah minimum provinsi mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1997-2012. Namun secara simultan Pertambahan penduduk, inflasi dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1997-2012.	Literatus Vol. 2 No. 2

No	Penulis/Tahun/Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Ni Putu Valentiana Shanty Putri, I Ketut Suardhika Natha (2015) “Pengaruh Penddapatan Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan”	Variabel independen: PAD Variabel dependen: Ketimpangan Pendapatan	Variabel independen: DAU, Belanja Modal	.Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan. Secara parsial, PAD dan DAU Berpengaruh Positif dan signifikan sedangkan Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan Distribusi pendapatan.	E-Jurnal EP Unud, 4 [1] ISSN: 2303-0178
14	Devi Astuti, Alexandra Hukom (2023) “Analisis Pengaruh PDRB, IPM, Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kalimantan Tengah”	Variabel independen: Tenaga Kerja (TPAK) Variabel dependen: Ketimpangan Pendapatan	Variabel independen: PDRB, IPM	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Disparitas pendapatan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh PDRB dan IPM. Sedangkan tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan.	Optimal : Jurnal Ekonomi DAN Manajemen Vol.3 No.2 e-ISSN: 2962-4010
15	Emi Haryaty Nengsih, Syamsurijal Tan, Erni Achmad (2023) “Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhinya di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi”.	Variabel independen: TPAK Variabel dependen: Ketimpangan Pendapatan	Variabel independen: TPT, IPM, Pertumbuhan Ekonomi	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel TPT dan IPM, berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2013-2021. Sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh	J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains) Vol.8 No..2 ISSN: 2541-6243

No	Penulis/Tahun/Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2013-2021, sementara TPAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2013-2021.	
16	Aprillia Nilasari, Rizky Amelia (2022) “Pengaruh PDRB Per Kapita, IPM, dan TPAK, Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia ”.	Variabel Independen: TPAK Variabel Dependen: Ketimpangan Pendapatan	Variabel Independen: PDRB Per Kapita, IPM	Penelitian ini memberikan hasil positif signifikan antara PDRB per Kapita menunjukkan bahwa PDRB per kapita, dan IPM berpengaruh positif signifikan, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.	Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation Vol.2 No.2

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini, akan dianalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan DIY dengan menguji lima variabel. Lima variabel tersebut dipilih dengan pertimbangan landasan teori dari pendapat beberapa ahli serta dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan analisis penyebab ketimpangan pendapatan. Untuk mempermudah penulis dalam

penelitian maka dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan Tingkat Pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pendapatan Asli Daerah, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Pendapatan.

2.3.1 Hubungan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Ketimpangan Pendapatan

Pada indeks rata-rata lama sekolah diasumsikan lama sekolah yang ditempuh sesuai dengan masa sekolah dalam waktu yang normal. Di mana lama sekolah 6 tahun setara dengan lulus Sekolah Dasar (SD), lama sekolah 9 tahun setara dengan lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP), lama sekolah 12 tahun setara dengan lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), kemudian lama sekolah 16 tahun setara dengan lulus jenjang perkuliahan atau S1 dan seterusnya. Lama sekolah yang dimaksud merupakan masa sekolah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan sesuai dengan asumsi masa sekolah yang telah disebutkan.

Saat seorang penduduk telah menyelesaikan pendidikannya maka ia akan memasuki pasar tenaga kerja, pendidikan terakhir dan lama sekolah yang ditempuh pun akan mempengaruhi pendapatan yang kemudian akan dihasilkan. Untuk mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan terdistribusi secara merata pada seluruh tenaga kerja, maka dibutuhkan produktivitas.

Tenaga kerja yang produktif serta memiliki kualitas yang mumpuni akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang kemudian dalam jangka panjang akan mengurangi ketidakmerataan penyebaran pendapatan. Maka pada penelitian ini diasumsikan bahwa rata-rata lama sekolah seorang penduduk akan dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan jika

diiringi dengan produktivitas yang sesuai pada jenjang pendidikan yang telah ditempuh.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Zulham (2023) dan menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Sehingga ketika tingkat pendidikan mengalami peningkatan akan mengurangi ketimpangan, begitu pun sebaliknya.

2.3.2 Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan

Jumlah angkatan kerja yang ada dapat mempengaruhi adanya tingkat disparitas pendapatan. Angkatan kerja merujuk pada total individu yang terlibat dalam pekerjaan atau perekonomian pada suatu daerah tertentu. Jika partisipasi angkatan kerja meningkat maka tingkat kemakmuran dan kegiatan ekonomi juga meningkat serta untuk permasalahan disparitas pendapatan akan berkurang. Angkatan partisipasi dalam dunia kerja sangat terkait dengan gaji yang ditawarkan di pasar tenaga kerja. Munculnya lapangan pekerjaan baru, penyerapan tenaga kerja baru, kemampuan ekonomi masyarakat untuk berbelanja akan meningkat serta permintaan terhadap barang dan jasa juga akan meningkat. Tawaran upah yang lebih tinggi dapat menarik lebih banyak individu untuk bergabung di dalam pasar tenaga kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja merujuk pada persentase jumlah orang yang bekerja atau mencari pekerjaan aktif dalam usia kerja terhadap jumlah total populasi usia kerja. Sementara itu, ketimpangan pendapatan adalah perbedaan atau

disparitas dalam pendapatan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat.

Danawati Dkk (Arsyillah, 2019) mengklaim bahwa kesenjangan pendapatan dapat dikurangi dengan meningkatkan jumlah orang yang berpartisipasi dalam angkatan kerja. Besarnya angkatan kerja tumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja. Dengan asumsi adanya korelasi antara jumlah tenaga kerja dan produktivitasnya, maka diharapkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi akan menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Jika produktivitas tumbuh seiring dengan produksi yang lebih tinggi, hal itu berpotensi meningkatkan pendapatan dan mengurangi kesenjangan pendapatan.

Angkatan Kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada periode tertentu. Angkatan kerja sendiri terdiri dari 2 golongan yaitu golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Dalam masyarakat ada yang tidak dihitung atau termasuk dalam kategori angkatan kerja seperti penduduk yang masih menempuh sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan masyarakat penerima pendapatan. (Elinda Madona Siburian, 2019)

Hasil Penelitian Nilasari & Amelia (2022) dan yang menyatakan bahwa TPAK memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga ketika TPAK meningkat maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan, begitu pun sebaliknya.

2.3.3 Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan yang ada pada daerahnya, pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Pendapatan daerah akan berdampak pada meningkatnya dana pembangunannya jika pendapatan daerah selama periode laporan lebih tinggi, maka proporsi dana pembangunan juga lebih tinggi (Ani dan Dwirandra, 2014). Lebih lanjut, Tahawa dan Khaldun (2021) menjelaskan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan akan cenderung meningkatkan proses pelayanan pada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang akhirnya menjadi salah satu faktor untuk pengentasan ketimpangan. Selain itu dengan optimalnya pengelolaan pendapatan daerah menurut Mohamad et al (2021) dapat terlaksananya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dengan baik, dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan sebagai komponen penerimaan dalam APBD.

Asmuruf (2015) mengatakan bahwa PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah, semakin tinggi PAD suatu daerah maka tingkat ketergantungannya dengan pemerintah pusat semakin rendah. Dengan kemampuan tersebut, dapat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan ketimpangan dan kemiskinan di daerahnya.

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dapat berperan aktif dan menjadi pusat ukuran dalam implementasi otonomi daerah di setiap wilayah. Kenaikan jumlah PAD secara terus-menerus diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan yang ada. Jika merujuk data BPS Provinsi DIY, ditemukan PAD di setiap kawasan Provinsi DIY mengalami peningkatan secara berkala. Kenaikan tersebut perlu ditinjau kembali sehingga dapat mengoptimalkan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan yang semakin melebar (Fauza, 2019).

Hasil Penelitian Aryani et al. (2023) dan Jamiel et al. (2022) PAD memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sehingga ketika PAD meningkat maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan.

2.3.4 Hubungan Upah Minimum kab/kota terhadap Ketimpangan Pendapatan

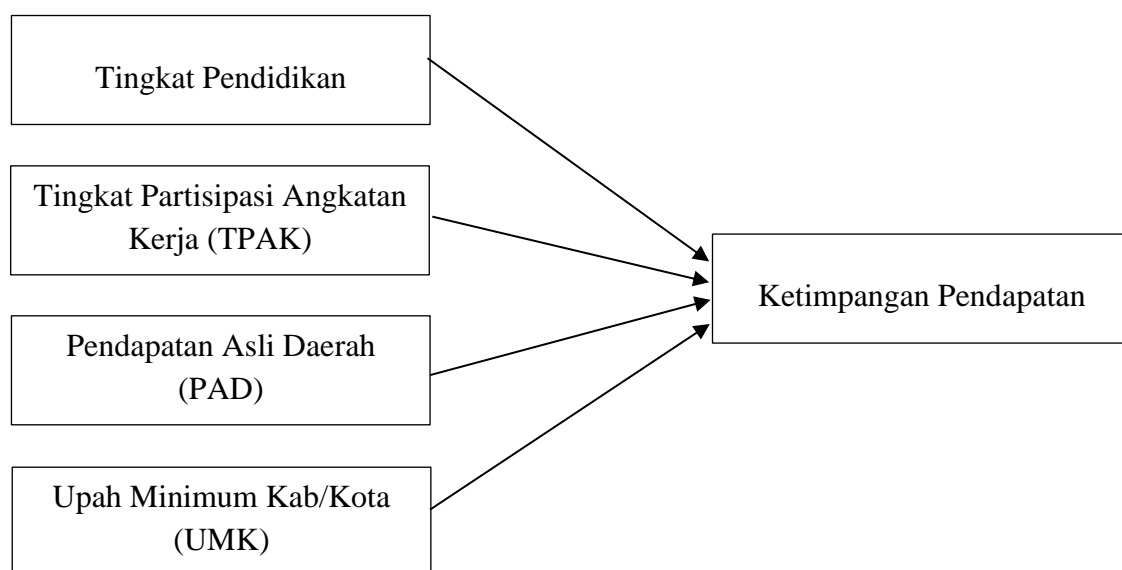
Secara teori, teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum akan meningkatkan kesenjangan pendapatan ketimbang menguranginya. Upah minimum menyebabkan non-pasar berperan menentukan batas minimum upah di pasar tenaga kerja, yang meningkatkan harga tenaga kerja. Dengan meningkatnya harga tenaga kerja, upah minimum menghasilkan pengurangan permintaan tenaga kerja dan sebagian pekerja akan menjadi pengangguran. Di sisi lain, institusional ekonom berpendapat bahwa upah minimum mengurangi ketimpangan. Upah minimum redistribusi pendapatan dengan menurunkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan upah pekerja terendah menurut Levitan & Belous Volscho, dalam (Ermatry Hariani 2019).

Dengan demikian, dengan menetapkan upah minimum maka standar upah akan lebih tinggi dan menciptakan upah minimum maka standar upah akan lebih tinggi dan menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih adil menurut Bluestone & Harisson, 2000 (dalam Nangarumba 2015).

Dalam (Nurmaliza 2015) secara empiris beberapa studi telah secara eksplisit mencoba meneliti efek dari upah minimum terhadap ketimpangan. Dalam konteks Indonesia, Islam dan mengambil pendekatan tidak langsung untuk mengklaim bahwa upah minimum di Indonesia bukanlah kebijakan yang buruk dari segi profitabilitas perusahaan. Mereka menemukan bahwa kebijakan upah minimum tersebut tidak menyebabkan pengurangan profitabilitas bisnis bahkan setelah mengontrol faktor endogenitas upah minimum. (Nazara 200)

Cun dan khor 2010 dalam (Anshary M, Zul Azhar, dan Ariusni (2019) menemukan bahwa perubahan undang-undang upah minimum merupakan faktor penting dan relevan memberikan kontribusi untuk memperlambat ketimpangan upah antara bagian atas dan bawah dari distribusi upah dan pendapatan di Indonesia. Dalam (Anshary M, Zul Azhar, dan Ariusni (2019) Rama 2001 melakukan penelitiannya dengan memperlakukan kenaikan upah minimum sebagai variabel eksogen dan pada analisis tingkat provinsi, ia menemukan bahwa kebijakan upah minimum memiliki efek kenaikan upah rata-rata kurang dari 15% dan penurunan lapangan pekerjaan maksimal 15%, sehingga mengarah pada kesimpulan bahwa pada umumnya upah minimum bermanfaat bagi pekerja sektor formal, tetapi efek tersebut ditemukan secara tidak proporsional pada perusahaan-perusahaan kecil yang sangat bergantung pada tenaga kerja yang mempunyai keterampilan rendah

dan cenderung untuk berinvestasi dalam teknologi. Tapi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Volscho dalam (Nurain & Juliannisa 2022) dengan menggunakan data negara bagian selama sepuluh tahun dari tahun 1960-2000 untuk menguji hipotesis, Menyatakan bahwa negara dengan upah minimum yang lebih tinggi memiliki level ketimpangan pendapatan keluarga yang lebih rendah dan bahwa upah minimum negara mengurangi ketimpangan pendapatan. Sejalan dengan penelitian dari Anshari et al. (2018) dan Saputra & Zulham (2023) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2013). Maka dari rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang ada dapat dibuat beberapa hipotesis yang menjadi landasan dalam penelitian ini :

1. Diduga secara parsial Tingkat Pendidikan, TPAK, PAD, dan UMK berpengaruh Negative terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/kota di Provinsi Yogyakarta tahun 2011-2023.
2. Diduga secara bersama-sama Tingkat Pendidikan, TPAK, PAD, dan UMK berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kab/kota di Provinsi Yogyakarta tahun 2011-2023.